

Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) oleh Disperindag di Kabupaten Dompu

Syaiful¹, Samsudin², Ibrahim Zakariah³

^{1,2}Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

³Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Sep 30, 2026 Revised Oct 12, 2026 Accepted Oct 21, 2026 Keywords: Effectiveness Empowerment Government Policy Local Commodities Small and Medium Industry	This study analyzed the effectiveness of the Small and Medium Industry empowerment program conducted by the Department of Industry and Trade in Dompu Regency. Local industries faced constraints such as limited resources and low digital literacy, requiring strategic government interventions to survive and grow. This research utilized a descriptive qualitative approach to evaluate the program based on targeting accuracy, socialization, goal achievement, and monitoring indicators. The results indicated that the program successfully targeted local commodity processors, facilitating their transition into formal businesses. The department overcame digital literacy barriers by proactively visiting business locations to assist with digital administration during the socialization phase. Despite central budget limitations, the program achieved its primary goals by adapting its strategy to provide alternative commercial promotional spaces and free business legality facilitation. Furthermore, program monitoring was systematically conducted through mandatory quarterly reporting within the national industrial information system. The study concluded that the empowerment program effectively enhanced the productivity and competitiveness of local enterprises through adaptive strategies and continuous assistance. <i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i> 

Corresponding Author:

Syaiful,
Prodi Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: dompusyaiful388@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Keberadaan IKM menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berada pada sektor usaha kecil dan menengah. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, IKM terbukti memiliki kemampuan bertahan yang relatif baik sehingga menjadi sektor yang terus mendapat perhatian pemerintah (Budiarto et al., 2018).

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk IKM, terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia. Selain itu, hampir seluruh unit usaha di Indonesia didominasi oleh kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi

nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengembangkan sektor IKM secara berkelanjutan (Aftitah et al., 2024).

Meskipun memiliki peranan yang besar, perkembangan IKM masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan modal usaha, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya inovasi produk, lemahnya kemampuan pemasaran, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan legalitas usaha. Berbagai kendala tersebut menyebabkan daya saing produk IKM masih relatif rendah dibandingkan dengan produk industri yang lebih besar sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan (Sedyastuti, 2018).

Pemberdayaan IKM merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Program pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi, akses pasar, digitalisasi usaha, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha. Dengan demikian, pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah (Budiarto et al., 2018).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Di Kabupaten Dompu, pelaksanaan program pemberdayaan IKM menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Instansi ini melaksanakan berbagai program pembinaan berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi sertifikasi halal, digitalisasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), promosi produk melalui pameran, serta pendampingan legalitas usaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Kabupaten Dompu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan pangan. Berbagai produk unggulan seperti madu, susu kuda liar, hasil perikanan, produk olahan pangan, dan kerajinan lokal memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan IKM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Dompu (Dompu, 2024).

Berbagai program yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku IKM. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan jumlah tenaga pendamping, rendahnya literasi digital pelaku usaha, belum meratanya akses terhadap pembinaan, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sehingga diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai (Indonesia, 2023).

Penelitian mengenai efektivitas program pemberdayaan IKM telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membahas efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu masih sangat terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan potensi industri yang berbeda sehingga hasil penelitian di daerah lain belum tentu dapat menggambarkan kondisi Kabupaten Dompu (Creswell & Creswell, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu. Analisis dilakukan menggunakan indikator efektivitas program menurut Budiani (2007) yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dalam menyusun kebijakan pemberdayaan IKM yang lebih efektif dan berkelanjutan (Budiani, 2007).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep utama dalam administrasi publik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghasilkan manfaat yang sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Dengan demikian, efektivitas menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik, termasuk program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Siagian (2014), efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan oleh hasil nyata yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas organisasi. Steers (1985) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien sehingga mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Organisasi yang efektif ditandai oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, memiliki koordinasi yang baik, serta mampu memberikan hasil sesuai dengan harapan organisasi maupun masyarakat. Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output yang dihasilkan dengan outcome yang ingin dicapai. Artinya, suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga memperhatikan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.

Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas merupakan salah satu indikator utama dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan publik yang menjadi dasar penyusunannya. Dengan demikian, keberhasilan suatu program harus dinilai berdasarkan perubahan yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan, bukan semata-mata pada tingkat pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep efektivitas digunakan untuk menilai keberhasilan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.

Indikator Efektivitas Program

Untuk mengukur efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007). Model ini banyak digunakan dalam penelitian administrasi publik karena mampu menggambarkan keberhasilan suatu program pemerintah secara komprehensif melalui empat indikator utama.

1) Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan kesesuaian antara penerima manfaat dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dikatakan efektif apabila bantuan, pelatihan, maupun pembinaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang membutuhkan serta memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ketepatan sasaran menjadi aspek penting karena akan menentukan tingkat keberhasilan program dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan IKM, ketepatan sasaran dapat dilihat dari mekanisme seleksi peserta, pemerataan penerima manfaat, kesesuaian jenis usaha dengan program yang diberikan, serta transparansi proses penentuan peserta program.

2) *Sosialisasi Program*

Sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, serta persyaratan pelaksanaan program kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mampu mendorong partisipasi aktif pelaku IKM dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, media sosial, website pemerintah, maupun pendampingan secara langsung. Semakin baik proses sosialisasi, semakin besar pula peluang keberhasilan program karena masyarakat memahami manfaat yang diperoleh dari program tersebut.

3) *Pencapaian Tujuan Program*

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program berhasil diwujudkan setelah program dilaksanakan. Pada Program Pemberdayaan IKM, tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan kemampuan pelaku usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, meningkatkan legalitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Apabila sebagian besar tujuan tersebut berhasil diwujudkan, maka program dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila tujuan belum tercapai secara optimal, diperlukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program agar dapat dilakukan perbaikan pada periode berikutnya.

4) *Pemantauan Program*

Pemantauan atau monitoring merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama program berlangsung. Monitoring dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemberdayaan IKM, pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, evaluasi hasil pelatihan, pendampingan usaha, monitoring perkembangan produksi dan pemasaran, serta evaluasi terhadap perkembangan usaha peserta program. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Konsep pemberdayaan lahir sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Kartasasmita (1996) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki sehingga mampu keluar dari berbagai keterbatasan. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan, akses terhadap sumber daya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung berkembangnya kemampuan masyarakat. Suharto (2017) memandang pemberdayaan sebagai suatu proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, memiliki kepercayaan diri, mampu mengambil keputusan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ife & Tesoriero (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan.

Dalam konteks pengembangan Industri Kecil dan Menengah, pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan kewirausahaan, bantuan teknologi, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, perluasan akses pasar, digitalisasi usaha, serta fasilitasi pembiayaan. Program-program tersebut bertujuan menciptakan pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Konsep Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), IKM juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat struktur industri nasional. Karakteristik IKM yang relatif fleksibel menjadikan sektor ini mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk ketika terjadi krisis ekonomi maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai bentuk pemberdayaan IKM. Bentuk pemberdayaan tersebut meliputi kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar.

Menurut Tambunan (2021), IKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena jumlah unit usahanya mendominasi struktur dunia usaha nasional. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, IKM juga memiliki kemampuan memanfaatkan potensi sumber daya lokal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah. Namun demikian, perkembangan IKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, rendahnya inovasi produk, lemahnya manajemen usaha, serta terbatasnya akses terhadap teknologi dan pasar. Suryana (2018) menjelaskan bahwa daya saing IKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas sumber daya manusia, kemampuan berwirausaha, inovasi produk, akses teknologi, kemampuan pemasaran, serta dukungan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing IKM tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Dalam konteks pembangunan daerah, IKM memiliki fungsi yang sangat penting karena mampu mengolah potensi sumber daya lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk berbasis pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan daerah dapat berkembang menjadi komoditas unggulan apabila memperoleh dukungan berupa pelatihan, pendampingan, sertifikasi, digitalisasi usaha, promosi, dan kemudahan akses pembiayaan.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Berbagai komoditas unggulan seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, madu, susu kuda liar, serta produk olahan pangan lokal memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan IKM di Kabupaten Dompu menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Program pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara mandiri. Dalam konteks pengembangan IKM, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kompetensi pelaku usaha sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Suharto (2017), pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan berusaha. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendorong berkembangnya kemampuan masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan, bantuan teknologi, informasi pasar, pembiayaan, dan perlindungan hukum.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melaksanakan program pemberdayaan IKM melalui kegiatan komprehensif, meliputi peningkatan kompetensi dan manajemen, bantuan peralatan produksi, fasilitasi legalitas dan sertifikasi (halal, SNI, HKI), digitalisasi, pendampingan pemasaran dan pameran, serta kemudahan akses pembiayaan. Berbagai program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing produk lokal di kancah nasional hingga internasional. Namun, agar perubahan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya sementara, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif pelaku usaha, dukungan pemerintah, serta perlunya monitoring, pendampingan lanjutan, dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan seluruh tujuan tercapai secara optimal.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan IKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Disperindag memiliki peranan strategis sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dalam meningkatkan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perindustrian dan perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan sektor industri daerah. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar. Pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu berkembang secara mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Disperindag memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyusun kebijakan pengembangan industri daerah, melaksanakan pembinaan terhadap pelaku IKM, menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan usaha, memfasilitasi sertifikasi produk, mendorong digitalisasi usaha, memfasilitasi promosi dan pemasaran produk, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan IKM.

Di Kabupaten Dompu, berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi halal, digitalisasi usaha melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), promosi produk dalam berbagai pameran, serta pendampingan legalitas usaha. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperkuat daya saing IKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, jumlah tenaga pendamping yang belum memadai, rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha, serta belum meratanya jangkauan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh agar program pemberdayaan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Efektivitas program dianalisis menggunakan teori Budiani (2007) yang terdiri atas empat indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kapasitas pelaku IKM, serta memberikan

manfaat nyata bagi perkembangan usaha masyarakat. Hasil analisis terhadap masing-masing indikator diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Dompu serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas program pada masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif untuk memahami secara mendalam efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu. Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini mampu mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara holistik melalui penyajian data deskriptif yang menggambarkan kondisi riil di lapangan berdasarkan pengalaman informan (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021), sehingga peneliti dapat menggali informasi komprehensif mengenai proses pelaksanaan, kendala, serta manfaat program. Penggunaan jenis penelitian deskriptif ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan implementasi program secara sistematis demi menghasilkan evaluasi yang objektif mengenai tingkat efektivitasnya berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan selama proses penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menyusun serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Disperindag merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten Dompu. Kedua, Kabupaten Dompu memiliki potensi industri berbasis sumber daya lokal yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri pengolahan pangan. Ketiga, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan, pendampingan usaha, sertifikasi halal, digitalisasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), promosi produk lokal, dan fasilitasi legalitas usaha.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu. Sebagai landasan analisis untuk mengukur efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Budiani (2007), yang meliputi ketepatan sasaran program untuk menilai kesesuaian penerima manfaat dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan; sosialisasi program yang mencakup proses penyampaian informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan persyaratan kepada pelaku IKM; pencapaian tujuan program guna mengukur tingkat keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan, produktivitas, kualitas produk, legalitas usaha, dan daya saing; serta pemantauan program yang berfokus pada kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah pasca-pelaksanaan untuk mengetahui perkembangan usaha sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh peserta.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang berlandaskan pada pertimbangan bahwa individu terkait memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Informan penelitian dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: informan kunci (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Kepala Bidang Perindustrian, serta Kepala Seksi bidang IKM); informan utama (penyuluh atau pendamping IKM, staf Bidang Perindustrian, dan pelaku IKM peserta program pemberdayaan); serta informan pendukung (ketua komunitas atau asosiasi IKM, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku IKM non-peserta sebagai bahan

pembandingan). Penentuan jumlah keseluruhan informan tidak ditetapkan secara definitif sejak awal penelitian, melainkan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan hingga informasi yang dihimpun mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan secara komprehensif guna memastikan tingkat validitas penelitian yang lebih baik. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk menggali informasi riil terkait proses pelaksanaan, bentuk pembinaan, manfaat program, kendala operasional, hingga tahapan monitoring dan evaluasi Program Pemberdayaan IKM. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan sebagai penunjang penelusuran berbagai literatur dan dokumen administratif yang relevan, meliputi Rencana Strategis (Renstra) Disperindag Kabupaten Dompus, laporan pelaksanaan program, data statistik kuantitatif IKM, dokumen pendataan SIINAS, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan secara langsung terhadap aktivitas pembinaan dan pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompus guna memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk proses pelatihan, pendampingan usaha, promosi produk, dan aktivitas harian pelaku IKM. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur berlandaskan pedoman yang telah disusun sebelumnya guna memberikan keleluasaan bagi informan dalam menjelaskan pengalaman serta pandangannya secara mendalam terkait efektivitas pelaksanaan program. Sebagai pelengkap, teknik dokumentasi diterapkan dengan menghimpun berbagai data tertulis dan visual yang relevan, seperti laporan kegiatan, foto dokumentasi, statistik jumlah pelaku IKM, peraturan daerah, laporan tahunan Disperindag, serta beragam dokumen lain yang mendukung keabsahan hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan temuan lapangan; penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, maupun matriks guna memperjelas hubungan antar-data; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkesinambungan guna memastikan penafsiran selaras dengan kondisi empiris. Selanjutnya, guna menjamin keabsahan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta triangulasi teknik melalui perbandingan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Rangkaian pengujian tersebut juga dilengkapi dengan tahapan *member check* untuk mengonfirmasi kembali kesesuaian hasil wawancara secara langsung kepada informan, sehingga keseluruhan hasil penelitian ini dapat dipastikan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program Pemberdayaan IKM

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompus, evaluasi pelaksanaan program ini diukur menggunakan empat indikator utama efektivitas program. Salah satu indikator utamanya adalah ketepatan sasaran program, yakni kesesuaian antara penerima manfaat dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran menjadi aspek penting karena akan menentukan tingkat keberhasilan program dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut Suharto (2017) yang memandang pemberdayaan sebagai suatu proses sekaligus tujuan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Pada indikator ketepatan sasaran, Disperindag Kabupaten Dompu berupaya memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan menyelaraskan program pada visi misi pemerintah daerah. Keselarasan dengan visi misi daerah ini penting untuk menciptakan sinergi pembangunan, salah satunya melalui program "Jara Pasaka" yang berfokus pada komoditas unggulan lokal seperti jagung, porang, padi, sapi, dan kuda. Penetapan sasaran ditekankan pada pelaku usaha yang memiliki aktivitas pengolahan bahan baku untuk mendorong transisi dari usaha non-formal menuju usaha formal yang memiliki legalitas. Dalam konteks pengembangan IKM, pemberdayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan mampu bersaing.

Selain penyelarasan dengan program prioritas daerah, bantuan yang didistribusikan selalu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik usaha yang sedang berjalan guna menjamin efektivitas program di lapangan. Kesesuaian antara jenis pembinaan dengan kendala yang dihadapi pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan.

"Harus mengacu Program atau mengacu sama visi misi bupati misalnya Jara Pasaka, dipatokan sama pengolahan jagung, Pelatihan Pengolahan Jagung, Pengolahan Sapi, pengolahan ikan, jagung jadi beras, dan lebih mengindikasikan IKM dari non formal ke formal." (Ainun Jariyah, ST, Senin, 7 September 2026).

Dengan demikian, ketepatan sasaran di Kabupaten Dompu tidak hanya diukur dari aspek penerima manfaat, tetapi juga pada relevansi bantuan dengan potensi sumber daya lokal.

Sosialisasi Program Pemberdayaan IKM

Sosialisasi merupakan proses vital dalam penyampaian informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, serta persyaratan pelaksanaan program kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga mampu mendorong partisipasi aktif pelaku IKM dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan. Terkait indikator sosialisasi program, Disperindag Kabupaten Dompu melakukan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta secara aktif turun ke lapangan untuk menjangkau pelaku IKM secara langsung. Penyampaian informasi yang komprehensif sangat penting agar pelaku usaha dapat memanfaatkan program pemberdayaan secara optimal.

Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi di Kabupaten Dompu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar dalam tahapan sosialisasi adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, terutama terkait pemanfaatan program berbasis teknologi. Hal ini sangat terasa pada saat sosialisasi pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang mewajibkan penggunaan perangkat komputer dan akses internet. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan perangkat digital menjadi hambatan dalam pendataan dan pelaporan perkembangan usaha.

Untuk mengatasi hambatan literasi digital tersebut, Disperindag menerapkan metode pendampingan proaktif dengan membawa perangkat kerja langsung ke lokasi usaha para pelaku IKM.

"SIINAS harus menggunakan website dan juga agak sulit lewat handphone, dan harus memakai laptop dengan cara menjemput bola dan terus datang ke pelaku usaha dan berharap mereka memberikan data - data yang diperlukan dan bahan baku mereka." (Ainun Jariyah, ST, Senin, 7 September 2026).

Pendekatan interaktif "jemput bola" ini dinilai penting agar masyarakat memahami urgensi administrasi digital tanpa merasa terbebani oleh batasan teknologi yang mereka miliki.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Islam & Eriyanti (2024) yang menunjukkan bahwa peran aktif dinas terkait dalam mendekatkan diri kepada pelaku IKM melalui pendampingan langsung menjadi faktor determinan keberhasilan sosialisasi program pemberdayaan, terutama pada masyarakat dengan tingkat literasi yang masih terbatas. Senada dengan hal tersebut, Safitri,

Karmila, & Rismayanti (2025) dalam kajiannya terhadap strategi penyuluh industri di Kabupaten Garut menegaskan bahwa pendekatan personal dan kunjungan langsung ke lokasi usaha terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku IKM dibandingkan sosialisasi yang hanya mengandalkan media digital satu arah. Dengan demikian, strategi “jemput bola” yang diterapkan Disperindag Kabupaten Dompu dapat dipandang sebagai adaptasi kontekstual dari pola pendampingan yang juga terbukti efektif diterapkan di daerah lain.

Pencapaian Tujuan Program Pemberdayaan IKM

Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan program berhasil diwujudkan setelah program dilaksanakan. Pada Program Pemberdayaan IKM di Kabupaten Dompu, fokus utama pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas produk unggulan lokal, perluasan akses pasar, serta fasilitasi legalitas usaha. Pembinaan difokuskan pada produk-produk potensial seperti kain tenun (Muna Pa'a) dan madu di berbagai desa binaan untuk meningkatkan daya saing IKM lokal. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut menjadi tolok ukur efektivitas program pemberdayaan.

Kendati telah berupaya maksimal, optimalisasi pencapaian tujuan program di lapangan masih dihadapkan pada tantangan eksternal. Salah satu kendala utamanya adalah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada keterbatasan pendanaan untuk kegiatan pelatihan secara masif. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menyusun strategi pembinaan di tengah keterbatasan sumber daya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perkembangan IKM sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Sebagai solusi adaptif untuk mempertahankan perputaran ekonomi IKM, dinas mengalihkan strategi dengan memperbanyak ruang promosi dan transaksi bagi pelaku usaha.

"Kendala nyata di tahun ini di efisiensinya dari anggaran pusat.... jadi nggak bisa memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan lebih memberikan wadah-wadah jual beli para IKM contohnya seperti Car Free Day setiap hari minggu pagi..." (Ainun Jariyah, ST, Senin, 7 September 2026).

Melalui penciptaan wadah komersial reguler dan fasilitas pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal secara gratis, pelaku IKM tetap mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya secara signifikan meski dengan alokasi anggaran yang terbatas.

Hasil ini memperkuat temuan Iskandar, Sumartono, & Domai (2016) dalam evaluasinya terhadap program pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo, yang menyimpulkan bahwa pencapaian tujuan program pemberdayaan tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuan instansi pembina dalam mengadaptasi strategi pembinaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Wulandari & Syafril (2025) dalam kajiannya terhadap strategi pengembangan IKM oleh Disperindag Provinsi Sumatera Barat, yang menemukan bahwa inovasi berupa fasilitasi non-finansial, seperti penyediaan ruang pemasaran dan kemudahan legalitas usaha, mampu menjadi solusi alternatif yang efektif ketika dukungan anggaran pemerintah pusat terbatas. Keberhasilan strategi adaptif ini turut tergambar dari capaian konkret di lapangan, sebagaimana dilaporkan ANTARA News Mataram (2026a, 2026b), yang mencatat pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku IKM Dompu serta realisasi penjualan produk IKM senilai Rp62,8 juta pada ajang Expo Dompu Maju 2026, sebagai bukti nyata pencapaian tujuan program di lapangan.

Pemantauan Program Pemberdayaan IKM

Pemantauan atau monitoring merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama program berlangsung. Pada indikator pemantauan program, Disperindag Kabupaten Dompu berupaya memastikan adanya keberlanjutan pembinaan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis pasca-pemberian pelatihan atau bantuan. Monitoring dilakukan secara berkala agar

pemerintah dapat mengetahui apakah program pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran.

Mekanisme utama pemantauan yang diterapkan di Kabupaten Dompu adalah kewajiban bagi seluruh peserta program untuk terdaftar dan masuk ke dalam sistem pendataan SIINAS. Melalui sistem ini, pelaku usaha diwajibkan menyerahkan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap triwulan.

"Yaitu targetnya yang ikut pelatihan atau penerima bantuan itu mereka harus terdaftar di SIINAS, dan SIINAS ini harus melakukan laporan per triwulan dan melakukan pelaporan per tiga bulan supaya tahu bantuan yang diberikan berfungsi atau nggak buat mereka, apakah peningkatan hasil produksi mereka bisa diketahui dari laporan dari (SIINAS)." (Ainun Jariyah, ST, Senin, 7 September 2026).

Laporan triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah untuk mengukur efektivitas bantuan terhadap peningkatan produktivitas IKM.

Untuk menunjang kepatuhan pelaporan dan menjamin keberlanjutan program, Disperindag telah menyediakan sarana pendampingan khusus melalui Klinik SIINAS. Klinik ini diawaki langsung oleh tenaga penyuluh perindustrian yang bertugas membantu dan mengawasi pelaku IKM secara intensif. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan sarana komunikasi digital seperti grup *WhatsApp* guna memfasilitasi jalur komunikasi yang efektif sehingga kendala pasca-program dapat segera ditangani secara cepat dan tepat sasaran. Keberadaan pendampingan lanjutan ini sangat vital agar perubahan positif yang dihasilkan dari program pemberdayaan bersifat berkelanjutan.

Pentingnya mekanisme pemantauan yang sistematis ini sejalan dengan pandangan Mardikanto & Soebiato (2015) yang menegaskan bahwa tahapan monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus pemberdayaan masyarakat, karena tanpa pengawasan yang berkelanjutan, perubahan positif yang telah dicapai berisiko tidak bertahan lama. Efektivitas pemantauan berbasis SIINAS di Kabupaten Dompu turut didukung oleh data KM Bali 1 (2026) yang mencatat lebih dari 200 pelaku IKM Dompu telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pelaporan berkala tersebut telah berjalan dan menjangkau sebagian besar pelaku usaha binaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu telah berjalan secara efektif dan adaptif. Pada aspek ketepatan sasaran, program berhasil diimplementasikan dengan menargetkan para pelaku usaha yang memiliki aktivitas pengolahan bahan baku unggulan lokal, sehingga mampu mendorong transisi usaha dari non-formal menjadi entitas bisnis formal yang berlegalitas. Dalam tahapan sosialisasi, hambatan rendahnya literasi digital pada sebagian pelaku IKM berhasil diatasi melalui strategi pendampingan "jemput bola" yang proaktif, di mana dinas turun langsung ke lokasi usaha untuk membantu proses administrasi dan pendaftaran Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Pada aspek pencapaian tujuan dan pemantauan, program ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing pelaku usaha lokal meskipun dihadapkan pada kendala keterbatasan efisiensi anggaran pusat. Disperindag Kabupaten Dompu mengadaptasi strategi pembinaan dengan memperbanyak fasilitas ruang promosi komersial reguler, memfasilitasi legalitas usaha secara gratis, dan memberlakukan pengawasan secara terstruktur. Pemantauan berkelanjutan dijamin melalui kewajiban pelaporan berkala setiap triwulan ke dalam sistem SIINAS, yang didukung secara intensif oleh penyuluh perindustrian di Klinik SIINAS. Secara keseluruhan, intervensi strategis pemerintah daerah ini memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem IKM yang lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing di Kabupaten Dompu.

REFERENSI

- ANTARA News Mataram. (2026a). Disperindag Dompu dampingi IKM urus sertifikasi halal dan pengembangan produk lokal. <https://www.antaranews.com/berita/4638622/mataram-aktif-berikan-pendampingan-umkm-dapat-sertifikat-halal>
- ANTARA News Mataram. (2026b). Expo Dompu Maju 2026 catat penjualan produk IKM mencapai Rp62,8 juta. <https://mataram.antaranews.com/berita/549588/expo-dompu-maju-catat-penjualan-ikm-rp628-juta>
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu. (2025). Kabupaten Dompu dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–57.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Databoks Katadata. (2026a). Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2024 serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
- Databoks Katadata. (2026b). Laporan IMF: UMKM mencakup hampir 99 persen unit usaha di Indonesia.
- DetikFinance. (2025). Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional dan tantangan pengembangan sektor UMKM.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Akses pembiayaan UMKM dan strategi penguatan ekonomi daerah.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316342855>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (4th ed.). Pearson Education.
- Iskandar, D. T., Sumartono, S., & Domai, T. (2016). Evaluasi program pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo. *Journal of Public Sector Innovations*, 1(1), 17–22. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p17-22>
- Islam, A., & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan industri kecil masyarakat (IKM) di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2). <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134>
- Kadin Indonesia. (2025). Data perkembangan Industri Kecil dan Menengah sektor industri pengolahan di Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah Indonesia.
- KM Bali 1. (2026). Lebih dari 200 IKM Dompu telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Safitri, N., Karmila, M., & Rismayanti, E. (2025). Strategi bidang penyuluh industri dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 9(1), 209–216.
- Sasambo.id. (2025). Profil Kabupaten Dompu.
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.

- Sugiyono. (2023a). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023b). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. PT Refika Aditama.
- Suryana. (2018). Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses. Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2019). Perkembangan industri kecil dan menengah di Indonesia. LP3ES.
- Tambunan, T. T. H. (2021). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Wulandari, & Syafril, R. (2025). Strategi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Barat. *EDU RESEARCH Jurnal Penelitian Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.47827/jer.v6i3.1309>